

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Review – Review Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu mengenai tingkat inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga terhadap penerimaan negara, antara lain seperti yang dilakukan oleh Damayanti *et al* (2019) mengenai pengaruh tingkat inflasi, economic growth, dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak di negara – negara Asia, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Metode *explanatory research* digunakan pada penelitian ini sebagai penjelasan hubungan variabel-variabel yang dipilih sebelumnya dengan pengujian dugaan sementara. Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yaitu berupa data *time series* dari *website World Bank (data.worldbank.org)* pada periode 2005-2014 dengan teknik dokumentasi. Menggunakan sampel penelitian 5 negara yaitu Cina, Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan tingkat inflasi, *economic growth*, dan tarif pajak secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia. Koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,361 yang berarti 36,1% penerimaan pajak negara-negara Asia dipengaruhi oleh variabel bebas tersebut, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumidartini (2017), mengenai pengaruh nilai tukar rupiah serta tingkat suku bunga terhadap penerimaan pajak pada direktorat jenderal pajak, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh antara nilai tukar rupiah dengan penerimaan pajak dengan pengaruh

sebesar 47,90% dengan sifat searah (positif), Terdapat pengaruh antara tingkat suku bunga dengan penerimaan pajak sebesar 52,20 % dengan sifat tidak searah (negatif), dan Terdapat hubungan yang signifikan antara, nilai tukar rupiah, dan tingkat suku bunga secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Renata *et al* (2016), mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory research* dengan sampel yang digunakan merupakan teknik penentuan sampel jenuh yaitu menggunakan semua anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel. Data penelitian ini berupa *time series* dalam kurun waktu 2010-2014 dengan data bulanan maka jumlah sampelnya 60 pengamatan. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa bahwa inflasi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN, nilai tukar berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan PPN, dan bahwa jumlah PKP berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Mispuyanti dan Kristanti (2017), mengenai analisis pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kus, dan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak pada kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada wilayah kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo dimana wilayah ini masih dalam satu kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Penelitian ini dilakukan untuk masa 3 tahun yaitu 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 dengan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling *non- probability sampling* dengan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi kecil kurang dari 30 orang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara parsial, PDRB dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo sedangkan inflasi dan nilai kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Secara simultan, PDRB,

inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo.

Penelitian yang dilakukan oleh Syairoz dan Fatah (2017), mengenai analisis pajak dan variabel makroekonomi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif maka penelitian ini hanya mengambil data yang bersifat sekunder dari Biro Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan beberapa jurnal serta literatur lain yang relevan berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa KPP menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh, dengan arah hubungan yang positif, Wajib pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh di Indonesia, dengan arah hubungan yang positif, Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPh di Indonesia, dengan arah hubungan positif, dan Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini berarti naik turunnya suku bunga SBI tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap *et al* (2018), yang berjudul dampak kebijakan dan makroekonomi terhadap efektivitas penerimaan pajak di bursa efek indonesia. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan Penelitian menggunakan data sekunder dari dua sektor yaitu sektor Industri Barang Konsumsi (IBK) dan sektor Infrastruktur, Utilitis dan Transportasi (IUT) periode tahun 2010-2015 yang bersumber dari BEI. Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya hubungan positif antara nilai tukar (makro-ekonomi) dan kebijakan pajak, kemudian peningkatan inflasi berdampak signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dan ETR di kedua sektor, dan Penurunan suku bunga BI berdampak positif pada penerimaan pajak dan ETR di kedua sektor.

Penelitian yang dilakukan oleh Yüksel *et al* (2013) di Turkey, dengan berjudul *Tax Revenue and Main Macroeconomic Indicators in Turkey*. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengambilan data terdiri dari observasi tahunan dari tahun 1980 hingga 2012. Semua data kecuali pendapatan pajak total diunduh dari situs web resmi Dunia Bank. Total data pendapatan pajak, sebagai kumpulan pajak langsung dan pendapatan pajak tidak langsung, diperoleh

dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Pengendalian Fiskal (BUMKO). Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendapatan pajak sangat berkorelasi dengan investasi langsung asing, total cadangan, kredit domestik yang disediakan oleh bank, ekspor, impor, nilai tukar riil, M2 dan populasi, dan Penerimaan pajak dengan ekonomi makro lainnya variabel, tidak ada hubungan seperti itu terbukti untuk PDB, kredit domestik, utang jangka pendek, inflasi, perdagangan dan populasi sedangkan ada dua arah sebab akibat dengan pajak nilai tukar riil- pendapatan, dan pasangan pendapatan-M2 pajak. hubungan kointegrasi disetujui antara total pendapatan pajak, PDB dan stok hutang luar negeri.

Penelitian yang dilakukan oleh Edeme *et al* (2016) di Nigeria, yang berjudul *Alternative Specification and Estimation of Tax Revenue – Gross Domestic Product Relationship*. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif, dengan pengambilan data menggunakan metode OLS dapat digunakan baik dari model regresi linier dan log-linear. Secara linier, model penerimaan pajak dapat ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak sangat tinggi sehubungan dengan pendapatan. Meskipun tingkat pertumbuhan PDB telah cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, rasio Pajak-PDB belum tumbuh dengan cepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali, Sharafat (2014) di Pakistan, dengan judul penelitian *Inflation, Income Inequality and Economic Growth in Pakistan: A Cointegration Analysis*. Metode penelitiannya kuantitatif dengan Data deret waktu tahunan untuk variabel-variabel ini diambil dari Survei Ekonomi Pakistan (1990-91, 2000-2001, 2006-07, 2011-12) diterbitkan oleh Departemen Keuangan Pakistan dan Indikator Pembangunan Dunia (WDI, 2012) dari Bank Dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan lebih baik untuk pertumbuhan tetapi ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi sangat membantu untuk menetes manfaat pertumbuhan bagi masyarakat miskin di ekonomi Pakistan dan Inflasi disimpulkan memiliki dampak merangsang pertumbuhan dalam perekonomian. Tapi tingkat inflasi yang lebih tinggi mempengaruhi kemiskinan mengurangi dampak pertumbuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhaliwal *et al* (2015), penelitian yang berjudul *Historical cost, Inflation, and The US Corporate Tax Burden*. Metode penelitian ini adalah kuantitatif, Untuk menangkap yang diprediksi efek kenaikan pajak inflasi, peneliti kemudian membiarkan koefisien pada inflasi aktual bervariasi penampang melintang dengan tingkat properti, pabrik, dan peralatan khusus perusahaan (selanjutnya disebut PP&E) dan inventaris, proksi kami untuk intensitas penyusutan berbasis biaya historis dan harga pokok penjualan deduksi, masing-masing. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa beban pajak rata-rata meningkat untuk perusahaan dengan basis pengurangan pajak yang lebih tinggi pada biaya historis (mis., depresiasi dan harga pokok penjualan) pada saat inflasi tinggi. Hasil ini memberikan bukti kuat bahwa perusahaan padat modal dan inventaris menghadapi beban pajak riil yang lebih tinggi di hadapan inflasi dan Kontribusi lain dari penelitian ini adalah bahwa ia memberikan bukti bahwa pengurangan bunga tampaknya tidak mengimbangi pajak yang lebih tinggi beban yang dihadapi perusahaan padat modal dan inventaris.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Perpajakan Secara Umum**

Pajak menurut Brotodiharjo dalam Sukardji (2014:1) “Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sedangkan menurut Undang Undang No. 28 tahun 2007 tentang KUP pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesimpulan dari berbagai pengertian pajak adalah:

- a. Iuran rakyat yang diberikan kepada negara.
- b. Bersifat memaksa

- c. Dikenakan kepada orang pribadi atau badan
- d. Dilandasi peraturan Undang Undang
- e. Tidak mendapat imbalan secara langsung
- f. Digunakan untuk kemakmuran rakyat.

### **2.2.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “*pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*” (Mardiasmo, 2016:3). Dengan kata lain, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 4 yaitu (Ilyas dan Burton 2011:3): *Official Assessment System, Semi Self Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System.*

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dari proporsionalnya, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Waluyo, 2011:2).

### **2.2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, menurut Sumarsan (2017:5) pajak mempunyai beberapa fungsi , yaitu:

1. Fungsi Penerima (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi Kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

### **2.2.1.3 Sumber Penerimaan Pajak**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan negara pasal 1 ayat 8,9, dan 10 berbunyi “*Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPn), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya, Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor*”.

Sedangkan menurut Suryadi (2011:105) Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## **2.2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang bertanggung jawab atas kebijakan perpajakan, pajak penghasilan (PPh) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan (subjek pajak/Wajib Pajak) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh (objek pajak) dalam Tahun Pajak. Sedangkan menurut UU No 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1 berbunyi "*Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun*".

Menurut Mardiasmo (2011:135) Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya selama satu tahun pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Sedangkan Menurut Resmi (2011:74) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. dan menurut Suandy (2011:36) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian Pajak Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

### **2.2.2.1 Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan) yang dikenakan pajak. Menurut Resmi (2011:79) Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Resmi (2011:80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

#### **2.2.2.2 Indikator Pajak Penghasilan**

Adapun yang menjadi indikator penerimaan pajak penghasilan, Menurut kuncoro (2013) adalah:

1. Target Penerimaan PPh
2. Realisasi Penerimaan PPh

#### **2.2.3 Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak. kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan

jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah (Amiruddin, 2018:152).

Tahun 1936 Keynes menerbitkan bukunya *“The General Theory of Employment Interest and Money”* (teori Umum Tentang Kesempatan Kerja, Bunga dan Uang), yang merupakan dasar dari teori kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sering dikaitkan dengan keynesianisme, teori-teori ekonomi keynesian didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan proaktif dari pemerintah adalah satu satunya cara untuk mengarahkan perekonomian (wikipedia, 2018).

Menurut Maulida (2018) Secara garis besar, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk memengaruhi jalannya perekonomian dengan berbagai sasaran berikut ini:

1. Meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara, meliputi: bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lainnya
2. Memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
3. Menstabilkan harga-harga barang/mengatasi inflasi.

## **2.2.4 Inflasi**

### **2.2.4.1 Pengertian Inflasi**

Menurut Irham Fahmi (2012:79) Definisi singkat dari Inflasi adalah keadaan yang menggambarkan perubahan tingkat harga dalam sebuah perekonomian. Sedangkan menurut Murni (2013:202) menyatakan bahwa pengertian inflasi sebagai berikut: *“Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus”*.

M. Natsir (2014:253) menyatakan bahwa pengertian inflasi *“Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus”*. Sementara itu Bank Indonesia memberikan pengertian Inflasi yaitu meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas

(atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

#### **2.2.4.2 Jenis-Jenis Inflasi**

Inflasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan asal, cakupan pengaruhnya, sifat, tingkat pengaruh, dan berdasarkan periode, Menurut M. Natsir (2014:261) jenis-jenis inflasi yaitu:

1. Inflasi Secara Umum
  - a. Inflasi IHK atau inflasi umum (headline inflation) adalah inflasi seluruh barang dan jasa yang dimonitor harganya secara periodik. Inflasi IHK merupakan gabungan dari inflasi inti, inflasi harga administrasi dan inflasi gejolak barang (volatile goods).
  - b. Inflasi inti (core inflation) adalah inflasi barang dan jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (faktor-faktor fundamental misalnya akseptasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum yang sifatnya cenderung permanen dan persisten.
  - c. Inflasi harga administrasi (administered price inflation) adalah inflasi yang harganya diatur oleh pemerintah terjadi karena campur tangan (diatur) pemerintah, misalnya kenaikan harga BBM, angkutan dalam kota dan kenaikan tarif tol
  - d. Inflasi gejolak barang-barang (volatile goods inflation) adalah inflasi kelompok komoditas (barang dan jasa) yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Misalnya, bahan makanan yang bergejolak terjadi pada kelompok bahan makanan yang dipengaruhi faktor-faktor teknis, misalnya gagal panen, gangguan alam atau anolai cuaca.
2. Inflasi Berdasarkan Asalnya
  - a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi barang dan jasa secara umum di dalam negeri

- b. Inflasi yang berasal dari manca negara adalah inflasi barang dan jasa (barang dan jasa yang diimpor) secara umum di luar negeri.
3. Inflasi Berdasarkan Cakupan Pengaruhnya
    - a. Inflasi tertutup (closed inflation) adalah inflasi yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau beberapa barang tertentu.
    - b. Inflasi terbuka (open inflation) adalah inflasi yang terjadi pada semua barang dan jasa secara umum.
  4. Inflasi Berdasarkan Sifatnya
    - a. Inflasi merayap (creeping inflation) adalah inflasi yang rendah dan berjalan lambat dengan presentase yang relatif kecil serta dalam waktu yang relatif lama.
    - b. Inflasi menengah (galloping inflation) adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan seringkali berlangsung dalam periode waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi.
    - c. Inflasi tinggi (hiper inflasi) adalah inflasi yang paling parah ditandai dengan kenaikan harga mencapai 5 atau 6 kali, pada saat ini nilai uang merosot tajam.
  5. Inflasi berdasarkan tingkat pengaruhnya
    - a. Inflasi ringan adalah inflasi yang besarnya
    - b. Inflasi sedang adalah inflasi yang besarnya antara 10%-30% per tahun
    - c. Inflasi berat adalah inflasi yang besarnya antara 30%-100% per tahun
    - d. Inflasi hiper adalah yang besarnya >100% per tahun
  6. Inflasi Berdasarkan Periode
    - a. Inflasi tahunan (year on year), yaitu mengukur IHK periode bulan ini terhadap IHK di periode bulan yang sama di tahun sebelumnya.
    - b. Inflasi bulanan (month to month), mengukur IHK bulan ini terhadap IHK bulan sebelumnya.
    - c. Inflasi kalender atau (year to date), mengukur IHK bulan ini terhadap IHK awal tahun.

### 2.2.4.3 Faktor-Faktor Penyebab Inflasi

Inflasi dapat digolongkan karena penyebab-penyebabnya, Menurut M. Natsir (2014:255) faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan, sisi penawaran maupun ekspektasi. Yaitu:

1. faktor penawaran dan kenaikan harga-harga (inflasi) yang ditimbulkan dinamakan sebagai cost push inflation atau shock inflation. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan Inflasi karena tarikan permintaan (demand pull inflation) Inflasi karena tarikan permintaan yaitu kenaikan harga-harga yang timbul sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang.
2. Inflasi karena dorongan biaya (cost push inflation)  
Faktor jasa akibatnya, produsen harus menaikkan harga supaya pendapatan keuntungan (laba) dan kegiatan produksi bisa berlanjut terus dalam jangka panjang (sustainable).
3. Inflasi karena ekspektasi Ekspektasi  
inflasi sangat berpengaruh dalam pembentukan harga dan upah tenaga kerja. Jika para pelaku ekonomi, baik individu, dunia usaha berfikir bahwa laju inflasi pada periode lalu masih akan terjadi di masa yang akan datang, maka para pelaku ekonomi akan melakukan antisipasi untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul. Para pekalu usaha akan memperhitungkan biaya produksi dengan kenaikan tingkat harga seperti pada waktu yang lalu.

### 2.2.4.4 Pengukuran Inflasi

Menurut Bank Indonesia Inflasi diukur dengan IHK di Indonesia di kelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose – COICOP), yaitu:

1. Kelompok bahan makanan
2. Kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau
3. Kelompok perumahan
4. Kelompok sandang
5. Kelompok kesehatan

6. Kelompok pendidikan dan olah raga
7. Kelompok transportasi dan komunikasi

Menurut M. Natsir (2014:266) rumus yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah:

$$INF_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$INF_n$  : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n)

$IHK_n$  : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n)

$IHK_{n-1}$ : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)

#### **2.2.4.5 Indikator Inflasi**

Menurut Bank Indonesia mengemukakan bahwa Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain:

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas
2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu

ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

## **2.2.5 Nilai Tukar Rupiah**

### **2.2.5.1 Pengertian Nilai Tukar**

Perdagangan internasional akan mendorong terjadinya pertukaran dua atau lebih mata uang berbeda. Transaksi ini akan menimbulkan permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang tertentu, berikut ini beberapa pengertian tentang nilai tukar. Menurut Nopirin (2012:163) Harga di dalam pertukaran dua macam mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tertentu, perbandingan nilai inilah yang disebut exchange rate.

Menurut Sukirno (2011:397) *“Nilai tukar mata uang (exchange rate) atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabelvariabel makro ekonomi yang lainnya”*. Menurut Ekananda (2014:168) *“Kurs merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan hargaharga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama”*.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa nilai tukar merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang asing, seberapa mata uang domestik dihargai oleh mata uang asing, nilai tukar merupakan harga yang sangat penting dalam perekonomian.

### 2.2.5.2 Sistem Nilai Tukar Mata Uang

Sistem nilai tukar dapat diklasifikasikan menurut tingkat dimana nilai tukar tersebut dikendalikan oleh pemerintah, Menurut Ekananda (2014:314) terdapat 3 sistem nilai tukar yang dipakai suatu negara, yaitu:

1. Sistem kurs bebas (floating) Dalam sistem ini tidak ada campur tangan pemerintah untuk menstabilkan nilai kurs. Nilai tukar kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap valuta asing
2. Sistem kurs tetap (fixed) Dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan turut campur secara aktif dalam pasar valuta asing dengan membeli atau menjual valuta asing jika nilainya menyimpang dari standar yang telah ditentukan.
3. Sistem kurs terkontrol atau terkendali (controlled) Dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan mempunyai kekuasaan eksklusif dalam menentukan alokasi dari penggunaan valuta asing yang tersedia.

Menurut Sukirno (2011:397) sistem nilai tukar dibedakan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu :

1. Sistem Kurs Tetap Sistem kurs tetap (fixed exchange rate)  
Penentuan sistem nilai mata uang asing di mana bank sentral menetapkan harga berbagai mata uang asing tersebut dan harga tersebut tidak dapat diubah dalam jangka masa yang lama. Pemerintah (otoritas moneter) dapat menentukan kurs valuta asing dengan tujuan untuk memastikan kurs yang berwujud tidak akan menimbulkan efek yang buruk atas perekonomian. Kurs yang ditetapkan ini berbeda dengan kurs yang ditetapkan melalui pasar bebas.
2. Sistem Kurs Fleksibel Sistem kurs fleksibel  
Penentuan nilai mata uang asing yang ditetapkan berdasarkan perubahan permintaan dan penawaran di pasaran valuta asing dari hari ke hari.

### **2.2.5.3 Jenis-Jenis Nilai Tukar**

Jenis nilai tukar mata uang atau kurs valuta terdiri dari 4 jenis menurut Sukirno (2011:411) yaitu:

1. Selling Rate (Kurs Jual) Merupakan kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu.
2. Middle Rate (Kurs Tengah) Merupakan kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional, yang telah ditetapkan oleh bank sentral pada saat tertentu.
3. Buying Rate (Kurs Beli) Merupakan kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu.
4. Flat Rate (Kurs Rata) Merupakan kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank notes dan travellers cheque.

### **2.2.5.4 Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar**

Keseimbangan nilai tukar mata uang akan mengalami perubahan setiap waktu sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran mata uang tersebut akan berpengaruh pula pada fluktuasi nilai tukar mata uang tersebut, Menurut Sukirno (2011:402) faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, yaitu:

1. Perubahan dalam cita rasa masyarakat Cita rasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka ke atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan ia dapat pula menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor bertambah besar. Perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing.
2. Perubahan harga barang ekspor dan impor Harga sesuatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah sesuatu barang akan

diimpor ataupun diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif murah akan menaikkan ekspor dan apabila harganya naik maka ekspornya akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor. Dengan demikian perubahan harga-harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan dalam penawaran dan permintaan ke atas mata uang negara tersebut.

3. Kenaikan harga umum (Inflasi) Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada kurs pertukaran valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai sesuatu valuta asing. Kecenderungan seperti ini wujud disebabkan efek inflasi yang berikut :
  - a. Inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri dan oleh sebab itu inflasi berkecenderungan menambah impor.
  - b. Inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal, oleh karena itu inflasi berkecenderungan mengurangi ekspor.
4. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting peranannya dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke negara itu. Apabila lebih banyak modal mengalir sesuatu negara, permintaan ke atas mata uangnya bertambahnya, maka nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai mata uang sesuatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara dialirkan ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi di negara-negara lain.
5. Pertumbuhan Ekonomi Efek yang akan diakibatkan oleh sesuatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku apabila kemajuan itu terutama diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka pemerintah ke atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya dan oleh karenanya nilai mata

uang negara itu naik. Akan tetapi, apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaannya dan oleh karenanya nilai mata uang negara tersebut akan merosot.

#### 2.2.5.5 Pengukuran Nilai Tukar

Pengukuran nilai tukar dalam penelitian ini menggunakan kurs tengah, seperti yang dijelaskan oleh Sukirno (2011:411) kurs tengah, yaitu: “*Kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional, yang telah ditetapkan oleh bank sentral pada saat tertentu*”. Untuk mendapatkan kurs tengah sendiri. Menurut Ekananda (2014:201) nilai kurs tengah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kurs\ Tengah = \frac{Kb + Kj}{2}$$

Keterangan:

Kb : Kurs beli

Kj : Kurs jual

Berdasarkan teori-teori di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa dengan menggunakan kurs tengah sebagai indikator nilai tukar maka dapat mengetahui harga relatif dari mata uang dua negara yang umum diperdagangkan di Indonesia. Menurut pemahaman penulis dari teori-teori yang telah di paparkan di atas mengenai nilai tukar, bahwa nilai tukar merupakan harga suatu mata uang terhadap mata uang asing, seberapa mata uang domestik dihargai oleh mata uang asing. Nilai tukar mempunyai beberapa jenis seperti kurs jual, kurs tengah, kurs beli, serta dalam menentukan nilai tukar terdapat sistem yang mengaturnya seperti sistem kurs tetap, sistem kurs bebas. Sementara yang menjadi indikator dalam menentukan nilai tukar yaitu menggunakan kurs tengah karena kurs ini telah ditetapkan oleh bank sentral di Indonesia.

## **2.2.6 Tingkat Suku Bunga**

### **2.2.6.1 Pengertian Tingkat Suku Bunga**

Tingkat suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang yang dinyatakan dalam persen untuk jangka waktu tertentu, berikut ini beberapa pengertian tentang tingkat suku bunga. Menurut Sunariyah (2011:80) *“Harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu”*. Menurut Boediono (2014:76) *“Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung”*.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa tingkat suku bunga merupakan harga yang didapatkan dari penggunaan dana investasi dalam periode waktu tertentu, dan merupakan indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung.

### **2.2.6.2 Jenis-Jenis Tingkat Suku Bunga**

Tingkat suku bunga merupakan harga yang didapatkan dari penggunaan dana investasi dalam periode waktu tertentu, ada beberapa jenis tingkat suku bunga dari penggunaan dana tersebut. Menurut Kasmir (2011:137) ada 2 (dua) jenis suku bunga yaitu:

1. Suku Bunga Nominal Suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikan.
2. Suku Bunga Riil Suku bunga riil adalah suku bunga yang telah mengalami korelasi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi.

Menurut Sunariyah (2011:80) suku bunga terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

2. Bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga.

### **2.2.6.3 Fungsi Tingkat Suku Bunga**

Tingkat suku bunga dapat memberikan banyak kegunaan untuk mengelola penggunaan dana, ada beberapa fungsi tingkat suku bunga, menurut Sunariyah (2011:81) fungsi tingkat suku bunga, yaitu:

1. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
2. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain.
3. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.

Menurut Darmawi (2011:188) fungsi tingkat suku bunga, yaitu:

1. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
2. Tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal.
3. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.
4. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi volume uang beredar.

#### **2.2.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga**

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut. Menurut Darmawi (2011:182) menyatakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga, yaitu:

1. Harapan akan inflasi
2. Jatuh tempo sekuritas atau kredit
3. Keberadaan risiko pada peminjaman
4. Risiko tentang penarikan sekuritas sebelum jatuh tempo
5. Kemampuan pemasaran dan pajak.

#### **2.2.6.5 Pengukuran Tingkat Suku Bunga**

Pengukuran tingkat suku bunga dalam penelitian ini menggunakan harga BI Rate, seperti yang dijelaskan oleh Bank Indonesia *“BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik”*. Menurut Sunariyah (2011:80) *“Harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu”*.

### **2.3 Hubungan Antar Variabel**

#### **2.3.1 Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut M. Natsir (2014:253) Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena dengan adanya inflasi masyarakat akan mengurangi tingkat belanja mereka dikarenakan harga barang-barang yang semakin naik dan nilai mata uang yang semakin menurun. Hal ini disebabkan karena jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga menurunkan nilai mata uang. Banyak perusahaan atau badan usaha yang terganggu dalam memasarkan produk mereka dikarenakan tingkat belanja

masyarakat mengalami penurunan yang berdampak terhadap menurunnya penghasilan yang diterima yang berakibat semakin kecil pula pajak yang dibayar kepada negara.

Hal ini didukung oleh penelitian Harahap *et al* (2018), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan inflasi berdampak signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dan ETR di kedua sektor, dan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti *et al* (2019), Hasil penelitian menunjukkan tingkat inflasi secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia. Koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,361 yang berarti 36,1% penerimaan pajak negara-negara Asia dipengaruhi oleh variabel bebas tersebut, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

### **2.3.2 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)**

Perdagangan internasional akan mendorong terjadinya pertukaran dua atau lebih mata uang berbeda. Transaksi ini akan menimbulkan permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang tertentu, berikut ini beberapa pengertian tentang nilai tukar. Menurut Nopirin (2012:163) Harga di dalam pertukaran dua macam mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tertentu, perbandingan nilai inilah yang disebut exchange rate.

Dalam kondisi kurs yang stabil akan mendorong dunia usaha menjalankan kegiatannya dengan tenang khususnya bagi usaha yang menggunakan valuta asing dalam transaksinya. Fluktuasi kurs yang ekstrim dapat mengakibatkan perusahaan merugi atau bahkan kolaps dan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam menghitung penghasilan neto untuk kepentingan perpajakan, kerugian akibat selisih kurs merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga semakin besar kerugian akibat selisih kurs maka semakin kecil keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga Pajak Penghasilan yang dibayar juga semakin kecil (Sumidartini, 2017).

Hal ini didukung oleh penelitian Sumidartini (2017), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh antara nilai tukar rupiah dengan

penerimaan pajak dengan pengaruh sebesar 47,90% dengan sifat searah (positif) dan penelitian yang dilakukan oleh Harahap *et al* (2018), Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya hubungan positif antara nilai tukar (makro-ekonomi) dan kebijakan pajak.

### **2.3.3 Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)**

Tingkat suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang yang dinyatakan dalam persen untuk jangka waktu tertentu. Menurut Sunariyah (2011:80) tingkat suku bunga adalah: *“Harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu”*.

Menurut Sumirdatini (2017) suku bunga domestik sangat terkait dengan suku bunga internasional. Hal ini disebabkan baiknya akses pasar keuangan domestik terhadap pasar keuangan internasional dan kebijakan nilai tukar yang tidak fleksibel. Peningkatan akses tersebut telah memperbesar kendala manajemen moneter Bank Indonesia. Setiap upaya untuk mempengaruhi *money supply* dengan meningkatkan suku bunga di atas suku bunga internasional akan mendapat gangguan dari arus modal masuk berjangka pendek. Namun, Bank Indonesia terlihat dapat mempertahankan derajat kebebasan beberapa suku bunga domestik sehingga tetap dapat mempengaruhi suku bunga domestik tanpa merubah kebijakan nilai tukar. ketika tingkat suku bunga tinggi maka biaya perusahaan akan naik (karena bunga adalah biaya) sehingga harga pokok naik, laba berkurang, dan pajak terutang berkurang (Sumidartini, 2017).

Hal ini sesuai dengan penelitian Harahap *et al* (2018), Penurunan suku bunga BI berdampak positif pada penerimaan pajak dan ETR di kedua sektor. Penelitian yang dilakukan oleh Syairozi dan Fatah (2017) menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh).

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan Hipotesis Menurut Sugiyono (2017: 96), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka konseptual dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan di teliti.

H<sub>1</sub> : Tingkat Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

H<sub>2</sub> : Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

H<sub>3</sub> : Tingkat Suku Bunga berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

## 2.5 Kerangka Konseptual

